

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Sumatera Barat, Maka penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan analisis adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Sumatera Barat telah sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur jendral pajak Nomor per-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata acara pemotogan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 21
2. Penetapan PTKP PPh pasal 21 Kantor Gubernur Sumatera Barat telah sesuai dengan BJP.PTKP 2016 (PTKP terbaru) berdasarkan PMK No101/PMK.010/2016 dan juga diatur dalam Peraturan Direktur jendral pajak Nomor per-16/PJ/2016
3. Dari data-data analisis mengenai besarnya biaya jabatan dan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Sumatera Barat yang di potong oleh Bebdahara Keungan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru.
4. Prosedur Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang dilakukan Oleh kantor Gubernur Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang baik dan benar menurut Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur jendral pajak Nomor per-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata acara

pemotogan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 Untuk penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Kantor Gubenur Sumatera Barat untuk Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Final atas Honorarium dan tamsil lainnya.

5.2 Saran

Kantor Gubenur Sumatera Barat telah mengikuti Peraturan–Peraturan perpajakan yang terbaru, mulai dari perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara Keuangan di Kantor Gubenur Sumatera Barat. Dan penulis menyarankan untuk tetap mengikuti Peraturan-Peraturan Perpajakan terbaru.

